

Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan

Winda Anjelina¹, Nova Silvia², Nurhizrah Gitituati³

Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Padang

e-mail: windaanjelina2@gmail.com, novasilvia101190@gmail.com,
icha_yp@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan mutu SDM. Untuk itu, pemerintah perlu mengeluarkan beberapa kebijakan pendidikan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Kebijakan pendidikan terbaru di Indonesia saat ini adalah kebijakan merdeka belajar. Artikel ini membahas tentang 4 kebijakan program merdeka belajar. Metode dalam penulisan artikel ini yaitu teknik penelitian pustaka. Sumber referensi dalam penulisan ini diambil dari buku-buku dan artikel ilmiah yang sudah diterbitkan. Manfaat dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui program kebijakan merdeka belajar tersebut.

Kata kunci: *kebijakan pendidikan, program merdeka belajar*

Abstract

Education plays an important role in improving the quality of human resources. For this reason, the government needs to issue several educational policies in order to improve the quality of education. The latest education policy in Indonesia today is the independent learning policy. This article discusses the 4 policies of the independent learning program. The method in writing this article is a library research technique. Reference sources in this writing are taken from books and scientific articles that have been published. The benefit of this writing is, to find out the program of the independent learning policy.

Keywords : *education policy, learning independence program*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini yang terus bergerak menuju kemajuan, membuat pendidikan menjadi prioritas utama bagi negara. Pemerintah menyadari bahwa, majunya suatu negara sangat tergantung pada mutu sumber daya manusia di negara tersebut.

Di Indonesia, mutu sumber daya manusia terbilang rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara maju yang ada diluar sana. Penyebab rendahnya mutu SDM tersebut tidak terlepas dari pengaruh pendidikan.

Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional. Untuk itu peningkatan sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Jika dibiarkan saja, maka negara Indonesia akan selalu tertinggal dari negara lain. Apa lagi saat ini perkembangan globalisasi semakin meningkat menuntut rakyat Indonesia harus mampu mengikutinya.

Mengingat betapa pentingnya pendidikan terhadap perkembangan suatu negara, maka pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di negaranya. Berbagai peraturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah, agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Akhir tahun lalu, Kemendikbud RI telah mengeluarkan kebijakan terbaru, yaitu kebijakan merdeka belajar. Program merdeka belajar dijabarkan dalam empat kebijakan yaitu: (1) penghapusan UN (2) penyelenggaraan USBN yang pelaksanaannya diserahkan pada sekolah, (3) penyederhanaan format RPP, (4) sistem zonasi penerimaan siswa baru (PSB).

Pembuatan kebijakan merdeka belajar di latar belakang oleh hasil penelitian *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2019 lalu. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa hasil penilaian dari peserta didik Indonesia masih sangat rendah.

Hanafi (2020) menyatakan bahwa, kebijakan pendidikan atau kebijakan sekolah akan berjalan dengan baik jika kebijakan tersebut memiliki aspek dan kelayakan tertentu.

METODE

Metode yang penulis pakai dalam penulisan artikel ini adalah teknik penelitian pustaka. Kajian menulis atau kajian pustaka merupakan suatu gerakan mengumpulkan informasi dari bermacam-macam sumber pemahaman (Harahap: 2014). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan dalam memperoleh data penelitian

Informasi yang digunakan untuk menyelesaikan artikel ini berasal dari berbagai sumber bacaan yang sudah diterbitkan seperti, buku dan artikel sesuai pemeriksaan ini.

Bagi kampus, merdeka belajar ini sangat bermanfaat. Keputusan diedarkan merdeka belajar ini agar tingkat kecerdasan peserta didik yang lulus semakin bertambah serta memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Setiap lulusan mampu menjadi pemimpin masa depan dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya kelak.

Dibutuhkan banyak program yang efektif untuk membangun pengembangan potensi setiap lulusan baik secara emosional dan juga mentalitas. Kepribadian yang matang lebih diutamakan untuk menariak mereka terjun pada dunia yang penuh daya saing tinggi. Hendaknya para lulusan kampus menjadi nilai jual pada setiap perusahaan atau lingkungan tempat mereka bekerja nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah bentuk kebijakan baru di Indonesia saat ini. Kebijakan merdeka belajar ini memberikan kemerdekaan bagi peserta didik, guru dan sekolah dalam menciptakan pendidikan yang berinovasi. Konsep ini menyesuaikan kondisi dimana proses PBM berjalan, baik dari sisi kearifan lokal, budaya, sosio-ekonomi maupun infrastruktur.

“Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dibuat untuk memberikan kebebasan bernalar. Pentingnya kebebasan dalam bernalar seyogyanya dimiliki pendidik dulu. Jika belum terealisasi pada pendidik, tentu tiada teraplikasi pada peserta didik.” (Iwinsah, 2020).

Kompasiana, 2020 menyatakan, apabila kemerdekaan belajar itu terpenuhi dengan baik, maka akan menciptakan kegiatan "belajar yang merdeka" dan sekolah disebut juga dengan sekolah yang merdeka. Diharapkan kemerdekaan belajar yang diberikan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Pembuatan program merdeka belajar ini dibuat karena melihat hasil penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 lalu. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa hasil penilaian peserta didik Indonesia berada pada posisi yang rendah. Melihat dari fakta itulah Nadiem Makarim menciptakan kebijakan merdeka belajar.

Empat Pokok Bahasan Kebijakan Mardeka Belajar

Selaku pembicara Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si, memaparkan empat pokok kebijakan dari program “Merdeka Belajar” yaitu sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN), ditiadakan.

Nadiem Makarim dalam kebijakan merdeka belajarnya akan melakukan penghapusan Ujian Nasional (UN). Ujian tersebut akan diganti dengan Asesmen Nasional (AN). Penilaian AN meliputi tiga aspek, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei karakter, serta Survei lingkungan belajar (M. Pendidikan, 2019).

AN dan UN memiliki perbedaan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan evaluasi capaian secara individu, tetapi secara keseluruhan, dan dilaksanakan secara berkala untuk memetakan sistem pendidikan. Secara umum asesmen tidak hanya menilai pengetahuan saja, tetapi mencakup semua metode yang dapat digunakan dalam mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, kemampuan, pemahaman, sikap, dan motivasi (PISA, 2016)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan program pemerintah untuk menilai kualitas (mutu) setiap lembaga pendidikan formal setara SD, SMP dan SMA. Kualitas dinilai dari hasil belajar peserta didik yang paling dasar. Untuk klasifikasi tersebut digunakan instrument yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Penilaian ini terdiri atas kemampuan menalar pada penerapan pengucapan (literasi), dengan ketercapaian menalar

merealisasikan angka (numerasi), serta membantu pengetahuan kepribadian. Penilaian ini digunakan guna menimbang kesanggupan siswa dalam mencerna ilmu dan penguatan pendidikan karakter.

2. USBN

Dalam kebijakan ini, ujian diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut diperlukan untuk menilai kompetensi peserta didik. Penilaian tersebut dilakukan dalam berupa tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya, seperti penugasan dan portofolio. Kebijakan tersebut dibuat agar guru dan sekolah, merdeka dalam memberikan penilaian hasil belajar.

3. Penyederhanaan format RPP

Kebijakan ini dibuat agar guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. RPP yang dimaksud disini harus memuat minimal tiga komponen inti RPP yaitu 1) tujuan pembelajaran 2) kegiatan pembelajaran, dan 3) asesmen.

Kemerdekaan dalam menyusun RPP ini, diharapkan guru dan siswa memiliki banyak waktu untuk melakukan interaksi sehingga siswa menjadi lebih aktif. Selain itu penyederhanaan RPP ini juga bertujuan agar pembelajaran di sekolah tidak kaku.

4. Sistem zonasi PPDB lebih fleksibel.

Kemendikbud dalam program merdeka belajarnya tidak tergoyahkan dalam menerapkan sistem zonasi, namun menggunakan keputusan realistis guna mengatasi kesenjangan link serta kemampuan dalam selingkup lingkungan. Daya tampung melalui langkah ini setidaknya 50%, melalui tes 15%, serta melalui transfer 5%. Sedangkan langkah peringkat kelas dan selebihnya 0-30% berdasarkan situasi

Tujuan penerapan sistem zonasi meliputi:

1. Menyeimbangkan Portal Pendidikan

Pada masa pandemi seperti kala ini kita melihat efektifnya cara ini guna menetralsir jumlah peminat pendidikan pada sekolah yang dituju, betapapun ada kesenjangan dari naluri untuk meraih pendidikan di tempat yang dididamp- idamkan oleh pesera didik dan juga wali.

2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga

Dalam poin ini kita semakin bersyukur akan pentingnya upaya ini dalam mengikat keharmonisan keluarga dan penjagaan ketat terhadap perkembangan anak usia remaja. Kita bisa merasakan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengantar jemput anaknya saat bersekolah. Kita sedang membangun

kemandirian pada jiwa anak dengan memberikan kesempatan bergaul dengan teman-teman di sekitar rumahnya.

3. Menghapuskan eksklusif dan diskriminatif
Berdasarkan penglihatan kita mengemukakan bahwa terjadi ketidakadilan selama ini dalam memberi julukan kepada sekolah. Untuk itu dengan langkah ini kita bisa rasakan anak yang kaya tidak selalu berada di sekolah yang sama. Tetapi mereka berbaur dengan masyarakat kemampuan ekonomi menengah. Hal ini penting untuk membelajarkan anak menumbuhkan ke rendah hati, menyayangi sesama walaupun terlihat tak setara.
4. Meningkatkan kreatifitas guru
Frekwensi siswa sejak penerapan langkah ini menjadikan guru lebih banyak belajar dan menambahkan wawasan yang diperlukan untuk menakhlukan kecerdasan peserta didik. Mengapa tidak, selama ini mungkin guru terfokus dengan kemampuan peserta didik yang standar, tapi sejak adanya zonasi peserta didik yang di terima pada masing-masing sekolah memiliki kecerdasan di atas rata-rata.
5. Membantu analisis kebutuhan guru dan pendistribusiannya
Dengan penerapan ide ini pemerintah bisa mengukur kapasitas sekolah terhadap guru yang dibutuhkan. Karena sering kita jumpai sekolah yang keteteran dengan guru-guru honorer yang setiap waktu bertukar. Sekolah kewalahan mencari guru yang berkualitas untuk mengimbangi kecerdasan peserta didik yang melek digital pada sekarang ini.

Tatacara Perealisasian Zonasi

Dalam merangkul masyarakat menuju pencapaian kualitas pendidikan yang menyeluruh dan seimbang. Tata cara perealisasian zonasi di terapkan tiga langkah penjabaran yang berhubungan erat dalam penataan pendidikan berskala zonasi.

Managemen kuantitas; setiap jenjang sekolah akan di uji demi pengelompokan berdasarkan hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Meningkatkan ketercapaian; setiap jenjang sekolah yang teruji pada tahap manajemen kuantitas sebagai jenjang sekolah yang meraih prestasi akan direalisasikan (treatment) berskala zonasi terhubung bersama di tingkatannya dari segi alat pembelajarandalam jumlah yang memadai. Contohnya kelengkapan ruangan belajar yang menunjang, laborator komputer dan internet. Seterusnya jenjang sekolah diberikan dorongan berupa pelatihan kemampuan guru dengan menerapkan standar dan peningkatan sertifikasi pendidik, memaksimalkan jadwal pendidik dalam mengajar.

Pembimbingan dan pengawasan; setiap jenjang sekolah akan di putuskan beraktifitas di zona tertentu, bilamana terdapat ketidak optimalan dalam melaksanakan tugas maka akan di evaluasi berdasarkan organisasi KKG/MGMP/MKKS bersama jenjang (SMA) sebagai pokok skala zona untuk pendistribusian bagian belajar dalam lingkungan pengawasan

SIMPULAN

Untuk meningkatkan mutu SDM di Indonesia, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah membuat kebijakan baru yang dinamakan kebijakan “Merdeka Belajar”. Kebijakan ini dibuat guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang masih dikatakan rendah. Peningkatan mutu pendidikan ini dilakukan agar warga negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan globalisasi dan juga dapat bersaing dengan beberapa negara maju. Jika peningkatan mutu pendidikan ini tidak dilakukan, maka negara Indonesia akan terus tertinggal dari negara lain. Mengingat hal ini tidak boleh terjadi, maka pemerintah Indonesia berusaha membuat beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu kebijakan terbaru di Indonesia saat ini yaitu, kebijakan merdeka belajar. Program merdeka belajar Nadiem Makarim ini memiliki empat pokok bahasan yaitu: (1) penghapusan UN di sekolah (2) penyelenggaraan USBN yang pelaksanaannya diserahkan pada sekolah masing-masing, (3) penyederhanaan format rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk guru, (4) sistem zonasi penerimaan siswa baru (PSB) yang dibuat lebih fleksibel

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, N. 2014. Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra'. Vol 8. No.1
- Hanafi, Nurhizrah Gistituati dkk (2020). The Effect of Principal Policy on Teachers' Professional Commitments and Its Impact on Learning Effectiveness in Vocational Schools. *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Volume 504, 21-27
- <https://www.kompasiana.com/syekhmuhammad/5df20d25d541df6ca8471992/merdeka-belajarata-belajarmerdeka?page=1>
- Iwinsah, R. (2020). Menakar Konsep Kemerdekaan Belajar. Media Jualan Kito: Intens News Pelembang. Didownload tgl 20 Januari 2020.
- Murni, Sylviana. 2020. Peran Strategis Provinsi/ Kabupaten Kota dalam Implementasi Merdeka Belajar. Modul Seminar Nasional “Merdeka Belajar: dalam Mencapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2020.
- Pendidikan, M. (2019). Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- PISA. (2016). PISA 2015 Results in Focus. In OECD.
- <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/kjb/article/view/18379>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/kata-mereka-tentang-kebaikan-sistem-zonasi-dalam-ppdb>